

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Maraknya kasus-kasus korupsi dinegeri ini membuat gemas dan cemas masyarakat terhadap masa depan Negara kita. Korupsi telah menggerogoti kehidupan bangsa dan Negara Indonesia sejak kemerdekaannya diproklamirkan. Olehkarena tidak pernah diberantas secara sungguh-sungguh hingga tuntas, kejahatan tersebut terus berkembang bahkan merajalela hingga merusak sendi-sendi kehidupan bangsa dan bernegara rakyat Indonesia.

Seperti yang kita ketahui pada Kongres PBB ke 8/1990 di Havana dalam laporannya menyatakan hakikat bahaya korupsi, yaitu dapat menghancurkan efektivitas potensial semua program pemerintah, dapat mengganggu/menghambat pembangunan dan menimbulkan korban individual dan kelompok. Sementara dalam Kongres PBB ke-9/1995 di Kairo disebutkan bahwa korupsi dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas, dan membahayakan pembangunan sosial, ekonomi dan politik.

Hasil dari UN Convention Against Corruption 2003 diantaranya menyatakan bahwa korupsi adalah ancaman bagi keamanan dan kestabilan masyarakat,

merusak nilai-nilai dan lembaga-lembaga demokrasi, merusak nilai-nilai moral dan keadilan, membahayakan “pembangunan yang berkelanjutan dan *“rule of law”* dan mengancam stabilitas politik. Tidak jauh berbeda dengan hasil konvensi tersebut, Kongres PBB XI tahun 2005 juga menyatakan tentang hakikat bahaya korupsi, yaitu merintang kemajuan sosial, ekonomi dan politik, sumber daya masyarakat dialokasikan tidak efisien, meningkatnya ketidakpercayaan terhadap lembaga-lembaga politik, produktivitas menurun, efisiensi administratif berkurang, merusak/mengurangi legitimasi tatanan politik dan mengganggu pembangunan ekonomi yang berakibat pada ketidakstabilan politik, lemahnya infrastruktur, sistem pendidikan dan kesehatan dan pelayanan sosial lainnya.

Korupsi sangat berbahaya bagi sosial ekonomi masyarakat. Korupsi di bidang pendidikan misalnya, akan menghambat siswa belajar karena keterbatasan sarana dan prasarana. Uang 6,7 trilyun dalam kasus Centurygate setidaknya dapat diberikan sebagai beasiswa sebanyak 1 juta rupiah kepada 6.700.000 siswa.

Dengan melihat multi effect dari korupsi di atas, sangatlah wajar jika korupsi dikategorikan sebagai *extra ordinary crime* dengan berbagai dimensinya, seperti *economic crime, organized crime, white collar crime* dan *political crime*. Dengan bentuknya yang *extra ordinary crime*, maka upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi harus ditempuh dengan cara-cara yang luar biasa pula. Jika bisa sesempurna mungkin sehingga tidak ada lagi celah bagi para koruptor untuk bebas, terlebih jika ada niat ingin melemahkan atau membubarkan KPK.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk dengan misi dan amanah untuk memberantas korupsi yang diharapkan masyarakat untuk menciptakan keadilan, dengan publik sangat berharap agar pemberantasan korupsi tidak pilih kasih sehingga hukum benar-benar ditegakkan.

Masalahnya adalah, kurangnya tanggapan masyarakat dan rendahnya kesadaran masyarakat akan bahaya korupsi pada saat ini. Banyak masyarakat bersikap apatis terhadap kasus-kasus korupsi karena pemahaman mereka tentang bahaya korupsi kurang memadai. Kalau korupsi itu tidak berakibat langsung bagi mereka, maka mereka pun kurang memberikan respons. Kalaupun tahu di lingkungannya terjadi korupsi, tak jarang mereka pura-pura tidak tahu karena tidak mau mencampuri urusan orang lain atau takut menanggung risiko.

Kenyataan itulah yang menjadi salah satu penyebab korupsi sulit diberantas. Di samping itu, gerakan antikorupsi juga menjadi tidak dalam kondisi masih dan memiliki daya dorong yang kuat bagi pemberantasan korupsi di daerah. Ditambah dengan penegakan hukum yang lemah, maka lengkaplah kerentanan gerakan antikorupsi di Lampung. Gerakan antikorupsi sewaktu-waktu bisa dipatahkan oleh orang-orang yang terlibat korupsi. Kenyataan inilah yang kerap dialami para relawan Gerakan Anti Korupsi di Tanah Air.

Maka dari itu menyebabkan peneliti tertarik mengkajinya, khususnya untuk mengetahui bagaimana tanggapan dan kesadaran masyarakat terhadap bahaya korupsi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dirumuskan masalah penelitian adalah Bagaimana tanggapan dan kesadaran masyarakat Kota Bandar Lampung terhadap bahaya korupsi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah Untuk memperoleh pengetahuan dan deskripsi tentang penilaian masyarakat tentang korupsi.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan akan sangat bermanfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis, sebagai berikut:

Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat digunakan untuk pengembangan keilmuan Sosiologi, khususnya Sosiologi Kriminalitas, Sosiologi Pembangunan, maupun Sosiologi Korupsi.

Secara praktis, hasil penelitian dapat digunakan bagi masyarakat dan pemerintahan, di antaranya untuk (1) Membangun kesadaran masyarakat tentang korupsi dan dampak dari terjadinya korupsi; dan (2) Sebagai bahan rekomendasi penyempurnaan/revisi undang-undang dan peraturan yang terkait dengan pemberantasan korupsi serta bahan acuan bagi pemerintah (birokrat) dan masyarakat yang ingin mengetahui tanggapan dan kesadaran masyarakat terhadap bahaya korupsi di Bandar Lampung.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Terhadap Tanggapan

Tanggapan merupakan sambutan terhadap suatu objek yang dapat berupa kritik, komentar dan sebagainya (Kamisa, 1997 : 392). Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti “Tanggapan” adalah serapan, yaitu apa yang diterima oleh panca indra, bayangan dalam angan-angan, pendapat, pandangan, sambutan dan reaksi (Poerwadinata, 1982 : 102).

Selanjutnya Wasty Soemanto mengatakan bahwa tanggapan adalah bayangan yang tinggal ingatan setelah mengadakan pengamatan. Tanggapan tersebut terbagi dalam :

- a. Tanggapan masa lampau atau tanggapan ingatan.
- b. Tanggapan masa yang akan datang atau tanggapan mengantisipasi.
- c. Tanggapan masa kini atau tanggapan representative (tanggapan mengimajinasikan)(Soemanto, 1984 : 36).

Menggangap dapat diartikan sebagai reaksi stimuli dengan membangun kesan pribadi yang berorientasi kepada pengamatan masa lalu, pengamatan masa sekarang dan harapan masa yang akan datang.

Adapun menurut Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1982 : 17) tanggapan adalah gambaran dari suatu penggambaran dari sesuatu yang tidak pernah diamati, seluruh pribadi ikut aktif dalam bentuk tanggapan.

Tanggapan dapat disimpulkan adalah suatu kesan yang dapat ditangkap dalam bentuk pendapat, pengalaman dan tafsiran mengenai suatu aktivitas atau perbuatan tertentu akan bahaya korupsi.

B. Tinjauan Terhadap Kesadaran

Dalam psikologi, kesadaran didefinisikan sebagai tingkat kesiagaan individu pada saat ini terhadap rangsangan eksternal dan internal, artinya terhadap peristiwa-peristiwa lingkungan dan suasana tubuh, memori dan pikiran.

Kesadaran adalah suatu tingkat kesiagaan individu pada saat ini terhadap stimulus internal dan eksternal. Yaitu terhadap peristiwa-peristiwa lingkungan dan sensasi tubuh, memori dan pikiran. Pengertian lainnya adalah Kemampuan individu mengadakan hubungan dengan lingkungan serta diri sendiri (melalui panca inderanya) dan mengadakan pembatasan terhadap lingkungan serta diri sendiri (melalui perhatian). Bukti terjadinya pemrosesan informasi membuat para ahli kembali mengungkap konsep kesadaran.

Fungsi kesadaran (Shallice)

- a. Dapat digunakan dalam membuat keputusan. Dalam keadaan sadar seseorang dapat memutuskan pergi atau tidak, bekerja atau tidak, melanjutkan pendidikan atau tidak.
- b. Dapat digunakan dalam mengarahkan dan mengendalikan tindakan merencanakan, memulai dan mengarahkan tindakan) Misalnya dalam keadaan

sadar seseorang dapat melakukan kegiatan seperti membereskan ruangan, memberi obat, mengganti balutan.

- c. Dapat digunakan dalam pemantauan perilaku. Secara sadar seseorang mengamati perilaku orang lain.
- d. Memungkinkan terhadap penyesuaian perilaku. Dalam keadaan sadar seseorang dapat menyiapkan diri bila apabila menghadapi suatu masalah, dan mencari jalan keluar terhadap suatu masalah, atau menyesuaikan diri bila lingkungan terasa asing.

C. Tinjauan Terhadap Masyarakat

Definisi mengenai masyarakat ada bermacam-macam, tergantung pada sudut pandang masing-masing sarjana sosial. Beberapa sarjana Ilmu Sosial memberikan definisi masyarakat sebagai berikut (dalam Soerjono Soekanto, 1986 : 20) :

a. Mac Iver dan Page

Masyarakat adalah suatu sistem dari kebiasaan dan tata cara dari wewenang dan kerjasama antar berbagai kelompok dan penggolongan, dari pengawasan tingkah laku, serta kebebasan manusia, keseluruhan yang merubah.

b. Ralph Linton

Masyarakat merupakan setiap kelompok manusia yang hidup bersama cukup lama, sehingga mereka dapat mengatur diri sendiri dan menganggap mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batasan-batasan yang telah dirumuskan dengan jelas.

c. Selo Soemardjan

Masyarakat adalah orang yang hidup bersama menghasilkan kebudayaan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa masyarakat adalah orang yang dapat hidup bersama yang dapat mengatur diri sendiri menjadi satu kesatuan sosial dengan batasan-batasan yang dirumuskan dengan jelas.

D. Tinjauan Terhadap Korupsi

Secara harfiah, korupsi dapat kita artikan sebagai penyelewengan atau penggelapan uang Negara atau perusahaan untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Sedang kata “korup“ berarti buruk, rusak, busuk, suka memakai barang (uang) yang dipercayakan kepadanya, dapat disogok (melalui kekuasaannya) untuk kepentingan pribadi (Kamus Bahasa Indonesia, edisi kedua, Balai Pustaka).

Kata korupsi itu sendiri berasal dari bahasa latin yakni *corruption* atau *corruptus*. Kemudian dalam bahasa inggris kita mengenalnya sebagai *corruption*, *corrupt* dan dalam bahasa Belanda *Corruptie*.

Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberi batasan bahwa yang dimaksud dengan korupsi adalah “setiap orang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”.

Secara politik-hukum, korupsi dapat mengakibatkan pelayanan kepada masyarakat tidak optimal dan akhirnya akan tumbuh ketidakpercayaan

masyarakat terhadap penyelenggara negara. Pelayanan kepada masyarakat selama ini cenderung diskriminatif. Tanpa uang jabatan, atau kerabat, masyarakat sering mengalami kesulitan untuk mengurus sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggara negara. Aparat penyelenggara negara yang seharusnya melayani masyarakat menjadi sebaliknya : masyarakat yang melayani apa yang diinginkan penyelenggara negara. KKN mewarnai setiap pelayanan publik. Akibat pelayanan seperti itu, masyarakat menjadi kehilangan kepercayaan terhadap para penyelenggara negara, termasuk lembaga peradilan yang selama ini dinilai banyak kalangan kurang tegas dalam menindak koruptor.

Secara sosio-budaya, korupsi dapat mengakibatkan ketimpangan sosial. Ada sekelompok masyarakat yang diuntungkan dan ada pula yang dirugikan akibat praktek korupsi. Ketiadaan pemerataan ekonomi akhirnya bermuara pada kecemburuan sosial. Si kaya makin kaya dan si miskin makin susah. Kondisi sosial seperti ini, bisa menciptakan kerawanan sosial atau keamanan : maraknya kriminalitas bahkan perpecahan bangsa dan negara. Korupsi juga dapat menjadi budaya atau kebiasaan masyarakat. Karena sudah terbiasa melakukan korupsi, maka masyarakat tidak merasa terbebani apa-apa atau tidak merasa berdosa ketika melakukannya. Kebudayaan adalah hasil cipta, rasa, dan karsa manusia yang dilakukan terus menerus dan menjadi kebiasaan. Bukan mustahil jika korupsi kelak menjadi budaya bangsa ini. Jika korupsi sudah membudaya, kita tinggal menunggu kehancuran suatu bangsa.

Dari definisi korupsi serta akibat yang ditimbulkannya, pemerintah seolah-olah menjadi pihak yang selalu dirugikan setiap kali korupsi terjadi. Pendapat ini bisa

jadi seratus persen benar, seratus persen keliru, atau ada persentase tertentu antara kerugian negara dan kerugian yang diderita rakyat. Mungkin, akan ada unsur lain non-ekonomi yang akan dibahas dalam hal ini. Sebab, pada dasarnya ketika pemerintah menderita kerugian akibat korupsi, secara langsung rakyat pun terzalimi. Karena, beban pemerintah kemudian ditimpakan kepada rakyat, dan alokasi pembangunan untuk rakyat menjadi sedikit dikarenakan dana pembangunan habis dikorupsi.

Menurut Syed Husein Alatas korupsi dapat merusak jaringan masyarakat menjadi *self destructive*. Korupsi merangsang pengembangan korupsi yang lebih besar. Tingkat yang lebih jauh ini selanjutnya mendorong meningkatnya korupsi yang lebih besar lagi. Ketika pemerasan telah meluas dikalangan pegawai negeri, polisi, petugas loket, atau perawat di rumah sakit biasanya merupakan dampak dari korupsi sebelumnya di level yang lebih tinggi. Bagi kondisi negara yang melahirkan korupsi luas di kalangan pegawai negerinya, dibutuhkan keberadaan suatu situasi korupsi sebelumnya yang menyebabkan munculnya kondisi ini.

Menurut Alatas, biasanya peralihan dari tingkat pertama korupsi yang terbatas ke tingkat korupsi yang meluas dan dimulai dengan kelompok yang paling tak terganggu oleh kesulitan-kesulitan ekonomi yang mempengaruhi cara mereka mencari nafkah. Mereka ini adalah kelompok pejabat tinggi dan para pengusaha kaya. Ketika korupsi dalam lingkaran ini telah berlangsung beberapa waktu, masyarakat kemudian akan merasakan dampaknya. Antara lain, pendapatan negara menurun secara timpang dibanding volume perdagangan dan sumber-sumber yang

bisa dikenakan pajak. Nilai mata uang pun akan turun, sehingga harga barang-barang akan naik pula.

Begitulah, praktek korupsi itu kemudian berimbas ke level yang lebih rendah. Ketika hal itu terjadi, pegawai rendah mulai melakukan korupsi untuk mempertahankan kehidupan mereka. Namun, kesulitan ekonomi umum ini dilahirkan oleh korupsi yang dilakukan oleh mereka yang lebih kaya.

Ada banyak variabel menarik di sini, yang pada gilirannya menentukan apakah korupsi oleh kelas atas dan berpengaruh ini akan memunculkan kondisi-kondisi bagi korupsi umum. Makin mendalam dan antagonistiknya pemilahan dalam masyarakat Indonesia, harus dilihat sebagai akibat langsung dari sistem masa lalu. Yakni, akibat serangkaian kejahatan pemerintahan Soeharto, baik oleh penyelewengan pembangunan ekonomi, penolakannya terhadap hak-hak asasi manusia, maupun sentimen anti-Cina sembari merangkul para konglomerat yang dipelihara secara sistematis oleh kediktatorannya.

Pendapat Syed Husein Alatas di atas membuktikan bahwa wilayah kerugian korupsi sangat luas. Tidak hanya menyangkut negara, tetapi menyangkut hajat hidup orang banyak. Di samping itu, pola korupsi yang dilakukan oleh mereka atau pejabat yang berada di level atas dalam strata pemerintahan, ternyata mengimbas pada tataran yang berada di bawahnya. Sehingga, tidak heran kalau kemudian korupsi itu berlangsung di semua level pemerintahan. Uniknya, mendukung pernyataan di awal pembahasan ini, efek yang terjadi justru dirasakan oleh rakyat sebagai pihak yang secara terus-menerus dirugikan.

Menurut Tiara Vishwanath dan Daniel Kaufmann, ada lima komponen yang harus direformasi secara simultan sebagai upaya memerangi korupsi khususnya di pemerintahan daerah. *Pertama*, kebijakan ekonomi dan manajemen; yang meliputi deregulasi, desentralisasi dan penyederhanaan perpajakan, dan demopolisasi. *Kedua*, pengawasan keuangan. Antara lain manajemen keuangan, audit, penilaian awal (*procurement*). *Ketiga*, pengawasan masyarakat. Yakni, pengawasan yang terdiri dari pengawasan oleh parlemen/dewan perwakilan rakyat, masyarakat sipil di media, lembaga-lembaga independen/ LSM. *Keempat*, reformasi hukum yang meliputi kerangka kerja hukum, independensi hukum, penguatan hukum dan ADR (*Alternative Dispute Resolution*) Mechanism yang merupakan metode penyelesaian konflik di luar pengadilan. *Kelima*, reformasi administrasi dan pelayanan masyarakat. Di antaranya sistem gaji dan meritokrasi, desentralisasi, dan aksi kelompok masyarakat.

Berdasarkan pendapat beberapa pakar di atas, dapat disimpulkan bahwa korupsi adalah penyalahgunaan sumber dana publik untuk kepentingan pribadi. Berkaitan dengan itu, penting kiranya dalam penelitian ini juga dibedah beberapa definisi lain yang berkaitan langsung dengan korupsi Antara lain pengertian tentang pemerintah dan birokrasi.

E. Pemerintahan yang Baik

Selama zaman Orde Baru, paradigma pembangunan sepenuhnya bertumpu pada pertumbuhan ekonomi dan penciptaan stabilitas politik. Pertumbuhan dimaksudkan sebagai upaya untuk mengatasi kebangkrutan Orde Lama, sementara

stabilitas nasional dimaksudkan sebagai upaya menciptakan ketertiban politik. Dampak dari kebijakan stabilitas ini sangat dahsyat, antara lain, partisipasi publik menjadi barang mewah alias tidak pernah didapatkan oleh masyarakat.

Pada dekade 1970-an hingga 1990-an, kritik atas paradigma pembangunan Orde Baru terfokus pada lemahnya aspek partisipasi politik rakyat. Sementara di sisi lain, para pengkritik Orde Baru juga menyoroti konsekuensi-konsekuensi sosia-budaya-ekonomis dan strategi pertumbuhan dan stabilitas tersebut. Pada pertengahan dekade 1980-an barulah muncul istilah keterbukaan. Dan, bersamaan makin besarnya ketergantungan Indonesia terhadap lembaga kreditor, pada awal dekade 1990-an lahirlah istilah *good governance*.

United Nation and Development Program (UNDP) mendefinisikan pemerintahan (*governance*) secara luas sebagai suatu tindakan kekuasaan politik untuk mengatur perwujudan kepentingan publik suatu bangsa. Definisi yang masih luas ini dinilai mempunyai relevansi dalam konteks negara yang sedang berkembang mengingat kekuasaan politik memainkan peranan yang sering menentukan posisi dari kepentingan publik.

Terma “pemerintahan” ini di dalamnya juga meliputi unsur-unsur seperti pemerintah, organisasi-organisasi masyarakat sipil, lembaga-lembaga swadaya masyarakat, pasar, atau negara. Semua unsur itu memainkan peranannya masing-masing dalam membentuk dan mengatur kepentingan publik.

K.K. Gurugharana mendefinisikan pemerintahan sebagai pemberlakuan arah dan kontrol atas tindakan warga negara dimana kekuasaan dioperasikan untuk

mengatur sumber-sumber daya sosio-ekonomi yang dimiliki oleh suatu negara. Berdasarkan definisi tersebut, suatu pemerintahan yang baik dapat diinterpretasikan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan dari efektivitas dan efisiensi lembaga pemerintah dalam menjalankan tujuan dari kebijakan nasional hasil konsensus bersama. Oleh karena itu, di dalamnya terkandung elemen-elemen seperti (ICW, 2000) :

1. akuntabilitas pejabat pelayanan publik
2. transparansi atas prosedur yang dikeluarkan oleh pemerintah
3. prediktabilitas perilaku dan keputusan yang rasional
4. kebebasan memperoleh informasi untuk menjamin perkembangan ekonomi
5. kejelasan aturan-aturan hukum mengatur pemerintah serta institusi terkait yang disetujui oleh warga negaranya.

Dari poin-poin penting di atas, kita bisa mengambil sebuah kesimpulan mengapa pemerintah menduduki posisi yang penting setiap kali berbicara mengenai korupsi. Itu tak lain karena dalam aspek yang ada pada pemerintah menyangkut urusan publik yang banyak berkenaan dengan masalah fasilitas, di antaranya uang atau dana. Maka, tidak heran kalau pemerintah menjadi fokus pembicaraan setiap kali menyinggung masalah korupsi.

Ada lima unsur yang harus dipenuhi agar pemerintahan berjalan baik (*good governance*) dan para penyelenggara bersih dari KKN (*clean government*). Kelima unsur itu adalah : akuntabilitas (pertanggungjawaban), legitimasi (kepercayaan), transparansi (keterbukaan), supremasi hukum (penegakan hukum), dan partisipasi publik. Para penyelenggara negara harus bisa

mempertanggungjawabkan keuangan jika menggunakan atau melibatkan dana yang dikumpulkan dari masyarakat. Kenyataan menunjukkan masih banyak penyelenggara negara yang *me-mark up* dana pembangunan untuk kepentingan pribadi atas golongannya saja, sehingga pertanggungjawabannya tidak jelas kepada rakyat. Prinsip akuntalibitas harus dipegang teguh oleh para penyelenggara birokrasi dan pemerintahan.

Pemerintahan akan efektif dan efisien jika ada legitimasi yang kuat dari rakyatnya. Untuk meraih legitimasi yang kuat tersebut, pemerintah harus menjalankan roda pemerintahan sesuai dengan harapan masyarakat. Apabila pemerintah menutup-nutupi tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh seorang pejabat karena alasan tertentu, sesungguhnya hal ini semakin mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem dan pemerintahan. Agar pemerintah tetap mendapatkan legitimasi yang kuat, siapa pun pejabat yang korup seharusnya dibawa ke pengadilan.

Sistem pemerintahan yang transparan dicirikan oleh kepastian visi strategis pemerintah dalam menciptakan dan melaksanakan program yang efektif dan efisien serta prosedur yang jelas dalam pembuatan keputusan publik. Pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang membuktikan partisipasi masyarakat untuk mengontrol jalannya pemerintahan secara ekonomi dan politik. Hal ini harus didukung peraturan yang bisa memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menjalankan perannya dengan baik.

Pejabat pemerintah harus bertanggungjawab terhadap segala keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program yang menggunakan dana rakyat. Meskipun

seorang pejabat pemerintah telah mendelegasikan kewenangannya kepada bawahannya, jika terjadi kegagalan atau penyalahgunaan dana pejabat atasan tersebut harus mendapatkan hukuman yang banding tanpa memperhitungkan kepentingan politik tertentu.

Peran serta masyarakat sangat menentukan *good governance*. Masyarakat yang kritis untuk mengontrol wakil-wakilnya di pemerintahan akan memungkinkan tercapainya tujuan masyarakat yang adil dan makmur. Dengan adanya partisipasi publik yang luas, pejabat tidak akan semena-mena mengatur jalannya roda pemerintahan. Kontrol yang dilakukan rakyat seharusnya juga didukung oleh peraturan yang membuka ruang-ruang rakyat tanpa harus diintimidasi, diteror, dan dipersulit oleh siapapun.

F. Birokrasi sebagai Mesin Kekuasaan

Max Weber mendefinisikan birokrasi sebagai upaya penggunaan peraturan-peraturan dan ketentuan yang dibangun secara formal dan rasional, pemisahan antara kehidupan umum dan pribadi, terjadinya bentuk legalitas bani yang beralasan rasional, meluasnya cara bertindak yang rasional dan pelembagaan semua faktor tersebut ke dalam sebuah administrasi modern.

Sementara Peter Blau berpendapat bahwa birokrasi adalah suatu mekanisme sosial tertentu untuk memaksimalkan efisiensi kerja antarbagian suatu organisasi pemerintahan atau organisasi sosial. Blau mendasarkan definisinya pada tingkat kompleksitas dan banyaknya perbedaan masyarakat modern. Dalam perspektif Blau, kompleksitas persoalan dan banyaknya perbedaan masyarakat modern itu

membutuhkan suatu koordinasi antarbagian atau antarfungsi. Peran koordinasi inilah yang harus dijalankan oleh birokrasi.

Sebagai manifestasi “peradaban” modern, birokrasi tetap mengandalkan adanya kepatuhan bawahan terhadap atasan. Dalam prakteknya kemudian, birokrasi sering bukan memperlancar sistem organisasi, tetapi justru memperpanjang mata rantai persoalan dan menjadi tempat paling subur perkembangbiakan korupsi. Kenyataan ini tak lepas dari ciri peradaban masyarakat modern yang senantiasa mendasarkan kehidupan perekonomiannya pada uang.

Menurut Parkinson, fenomena birokrasi memiliki dua sifat dasar; yakni setiap pejabat negara berkeinginan untuk meningkatkan jumlah bawahannya dan mereka saling memberi kerja yang tidak perlu. Akibatnya birokrasi menjadi cenderung meningkatkan terus jumlah pegawainya tanpa memperhatikan tugas-tugas yang harus mereka lakukan. Fenomena kelebihan pegawai negeri sipil (PNS) di Lampung yang mencapai lebih dari 8.000 orang bisa menjadi penjelasan tesis ini. Bagi Pemda-Pemda tingkat dua di Lampung, dampak dari kelebihan pegawai tentu saja sangat besar. Selain menyebabkan kerja tidak efektif, pengangguran terselubung itu juga memboroskan anggaran daerah karena setiap bulan mereka harus digaji meskipun pekerjaannya tidak jelas.

Tidak ada satu negara pun di dunia ini yang karakter birokrasinya persis sama. Karakter birokrasi suatu negara atau pemerintahan tergantung pada aspek kesejarahannya. Indonesia yang memiliki latar belakang sebagai negara kepulauan yang mewarisi tradisi kerajaan-tradisional-agraris, memiliki karakter birokrasi yang lebih mencerminkan birokrasi patrimonial. Cirinya, antara lain,

hubungan patronklien tampak sekali nyata. Selain itu elite birokrasi biasanya terdiri atas orang-orang keluarga dekat penguasa, teman dekat, atau orang satu suku. Meskipun sudah mengadopsi birokrasi modern, toh wajah birokrasi di Indonesia hingga hari ini masih mencipakan sebagai wajah birokrasi tradisional-agraris atau birokrasi patrimonial

Menurut Hans-Dieter Evers, kekuatan politik birokrasi patrimonial berlandaskan pada nilai-nilai kultural. Kalau toh birokrat kehilangan kekuasaannya, tetapi model birokrasi itu akan diwariskan kepada penerusnya. Tesis ini bisa merujuk pada wajah birokrasi pasca-reformasi di Indonesia. Meskipun Soeharto telah jatuh dan tak lagi berkuasa, tetap wajah birokrasi patrimonial masih tampak nyata karena secara struktur kita memang mewarisi birokrasi patrimonial. Inilah yang menjadi salah satu penyebab kenapa korupsi tetap saja marak, sementara pemberantasan terhadapnya seperti hanya berjalan di tempat.

Selama Orde Baru berkuasa, birokrat tidak sekadar sebagai organ pembantu penyelenggara tugas-tugas pemerintahan, tetapi juga menjadi mesin politik yang mengabdikan kepada penguasa. Sebab itulah tidak mengherankan kalau birokrasi di Indonesia selama 32 tahun tak lebih sebagai lembaga yang sarat dengan berbagai kepentingan untuk memelihara kelangsungan rezim. Dalam birokrasi berkarakter seperti itulah korupsi, kolusi, dan nepotisme tumbuh subur. Korupsi sering dimaklumi sebagai sebuah kewajaran, sementara kritik atas tindakan korupsi sering ditafsirkan sebagai bentuk perlawanan atau pembangkangan.

G. Kerangka Pemikiran

Tindak pidana korupsi dalam berbagai bentuk mencakup pemerasan, penyuapan dan gratifikasi pada dasarnya telah terjadi sejak lama dengan pelaku mulai dari pejabat negara sampai pegawai yang paling rendah. Korupsi yang terjadi di Indonesia saat ini, terutama yang dilakukan oleh aparatur pemerintah sudah mulai dilakukan secara sistematis baik oleh perorangan maupun berkelompok (berjamaah), serta semakin meluas dan semakin canggih dalam proses pelaksanaannya. Korupsi ini semakin memprihatinkan bila terjadi dalam aspek pelayanan yang berkaitan dengan sektor publik, mengingat tugas dan kewajiban utama dari aparat pemerintah adalah memberikan pelayanan kepada publik/masyarakat.

Korupsi pada hakekatnya berawal dari suatu kebiasaan (habitat) yang tidak disadari oleh setiap aparat, mulai dari kebiasaan menerima upeti, hadiah, suap, pemberian fasilitas tertentu ataupun yang lain dan pada akhirnya kebiasaan tersebut lama-lama akan menjadi bibit korupsi yang nyata dan dapat merugikan keuangan negara. Untuk mencabut akar permasalahan sumber terjadinya korupsi di sektor publik, perlu didefinisikan sifat dari korupsi dan dilakukan pengukuran secara komprehensif dan berkesinambungan. Untuk dapat mendefinisikan sifat korupsi, dimulai dengan melakukan pengukuran secara obyektif dan komprehensif dalam mengidentifikasi jenis korupsi, tingkat korupsi dan perkembangan korupsi dan menganalisa bagaimana korupsi bisa terjadi dan bagaimana kondisi korupsi saat ini.

Untuk dapat mencegah secara efektif terjadinya korupsi, hendaknya dihindari pengukuran korupsi yang semata-mata bertujuan untuk mendeteksi pelaku korupsi dan menghukumnya. Penting untuk mulai menempatkan strategi pencegahan korupsi dengan tujuan untuk mengeliminasi faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi sejak dini. Dalam menetapkan strategi pencegahan korupsi, perlu diidentifikasi dan dianalisa faktor-faktor yang menjadi akar penyebab yang berkontribusi menimbulkan korupsi pada lembaga publik dan layanan publiknya.

Pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari strategi pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan langkah yang jitu memiliki tingkat keberhasilan di negara-negara lain. Masyarakat dan aparat penegak hukum merupakan ujung tombak yang keberadaannya saling melengkapi satu sama lain. Masyarakat yang berdaya atau berperan dapat mengontrol, bahkan jika proses penegakan hukum lemah dan tidak dapat menghadapi kejahatan ini (korupsi), maka masyarakat dapat tampil ke depan untuk sementara mengambil alih tugas-tugas aparat penegak hukum, syaratnya masyarakat harus diberi ruang dan kesempatan luas untuk berpartisipasi melalui sistem dan tatanan yang demokratis dan transparan. Meskipun aspek pemberdayaan itu sangat penting dalam proses dan strategi pemberantasan tindak pidana korupsi, namun itu semua harus dilakukan dalam batas-batas dan koridor hukum yang berlaku.

Bentuk dan sifat partisipasi masyarakat dalam proses tersebut harus diselenggarakan secara demokratis dalam susunan yang menghargai nilai-nilai (norma) dan rasa kepatuhan serta keadilan, tanpa harus mengabaikan perlindungan dan penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia. Meskipun upaya

pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan bagian dari upaya menciptakan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), namun tidak berarti upaya penegakan hukumnya disubordinasi oleh aspek politik dan pemerintahan. Meskipun pemberdayaan masyarakat itu sangat penting dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, namun titik tekannya harus terfokus pada penegakkan hukum berikut dengan lembaga-lembaga yang bertugas menangani masalah korupsi.

Semua pilar-pilar yang terkait dengan upaya dan proses penegakan hukum harus menopang dan memperkuat sehingga korupsi dapat ditekan ketitik yang dapat dikendalikan. Dengan demikian proses penegakan hukum merupakan rangkaian panjang dan saling terkait antar aspek yang saling mempengaruhi dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

Pemerintah jangan sampai kehilangan dukungan dari masyarakat akibat ketidakseriusannya memberantas tindak pidana korupsi.

Dengan alasan apapun pemerintah tidak boleh mengulur waktu untuk memberantas tindak pidana korupsi kelas kakap. Apabila pemerintah takut berhadapan dengan koruptor kelas kakap dan hanya mengadili atau memproses koruptor kelas teri, maka resikonya adalah kehilangan kepercayaan masyarakat dan menumbuhkan rasa ketidakpercayaan kepada pemerintah bahkan masyarakat akan berpikir bahwa pemerintah melindungi para koruptor kelas kakap. Untuk melakukan sesuatu kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sebab dan jenisnya. Begitu juga untuk memberantas tindak pidana korupsi, kita harus memahami dan mengerti apa saja jenis-jenis korupsi dan penyebabnya. Korupsi dapat berakibat

sangat besar baik secara ekonomi, politik, maupun sosial budaya dan hukum. Masyarakat banyak tidak menyadari bahwa perbuatan korupsi berakibat sangat buruk bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, tetapi masyarakat jarang dapat langsung merasakannya. Masyarakat hanya berasumsi yang dirugikan oleh perbuatan korupsi adalah keuangan dan perekonomian negara, pada hal secara tidak langsung yang dirugikan adalah masyarakat itu sendiri.

III. METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sebab, yang ingin diketahui dari penelitian ini adalah bersifat pemahaman dan sangat subjektif yang sangat tidak mungkin untuk diukur dengan angka-angka atau dikuantitaskan sehingga data kualitatif sangat mewarnai penelitian ini. Penelitian dengan pendekatan kualitatif, sebenarnya, tidak berbeda dengan penelitian dengan pendekatan kuantitatif dari segi penggunaannya yakni untuk memberi kemungkinan besar pada peneliti untuk mengadakan kegiatan aksi langsung di tingkat makro maupun mikro. Di tingkat makro, penelitian dapat berorientasi pada kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan korupsi, sedangkan di tingkat mikro penelitian berorientasi pada pemahaman masyarakat tentang korupsi dan dapat digunakan sebagai kegiatan aksi antikorupsi pada masyarakat yang menghendaki pelenyapan korupsi.

Metode penelitian kualitatif menurut Bogdan dan Taylor (1975:5) dalam Lexy J. Moleong (2003:3) adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tulisan atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian kualitatif (termasuk penelitian historis dan deskriptif) adalah penelitian yang tidak menggunakan model-model matematik, statistik atau

komputer. Proses penelitian dimulai dengan menyusun asumsi dasar dan aturan berpikir yang akan digunakan dalam penelitian.

Asumsi dan aturan berpikir tersebut selanjutnya diterapkan secara sistematis dalam pengumpulan dan pengolahan data untuk memberikan penjelasan dan argumentasi. Dalam penelitian kualitatif informasi yang dikumpulkan dan diolah harus tetap obyektif dan tidak dipengaruhi oleh pendapat peneliti sendiri. Penelitian kualitatif banyak diterapkan dalam penelitian historis atau deskriptif.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Sukarame Bandar Lampung. Dengan pertimbangan kelurahan tersebut secara geografis/transportasi mudah dijangkau, tidak rawan kriminalitas/konflik, dan peneliti mudah berkomunikasi dengan warga yang ada di kelurahan tersebut.

C. Penentuan Informan Kualitatif

Dalam penelitian ini informan yang dijadikan objek penelitian adalah masyarakat di Kelurahan Sukarame.

Menurut Spradly dan Faisal (1990:112), informan harus memiliki beberapa kriteria yang perlu dipertimbangkan, yaitu :

- 1). Subjek yang telah lama dan intensif menyatu dengan suatu kegiatan atau medan aktifitas yang menjadi sasaran atau perhatian dan ini biasanya ditandai oleh kemampuan memberikan informasi diluar kepala tentang suatu sasaran yang dipertanyakan.

- 2). Subjek masih terikat secara penuh serta aktif pada lingkungan dan kegiatan yang menjadi sasaran atau penelitian.
- 3) subjek mempunyai cukup banyak waktu dan kesempatan untuk dimintai keterangan.
- 4). Subjek yang mendalam memberikan informasi tidak cenderung diolah atau dikemas terlebih dahulu dan mereka relative masih lugu dalam memberikan informasi.

Berdasarkan uraian diatas, maka yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah masyarakat di Kelurahan Sukarame. Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan adalah Purposive Sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang disesuaikan dengan kriteria-kriteria tertentu yang di tetapkan berdasarkan tujuan penelitian. Kriteria yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut :

- 1) Masyarakat memiliki pengetahuan tentang korupsi yang terjadi di wilayah kota Bandar Lampung.

Dengan mengacu pada kriteria diatas maka jumlah informan yang sesuai adalah sebanyak 5 orang warga yang bertempat tinggal di lingkungan Kelurahan Sukarame.

D. Fokus Penelitian

Lexy J. Maleong dalam bukunya mengatakan bahwa tujuan dari membuat fokus penelitian adalah:

1. Untuk membatasi studi, sehingga tidak melebar
2. Secara efektif berguna untuk menyaring informasi yang mengalir masuk

Fokus utama dari penelitian ini adalah Sejauh mana Tanggapan dan Kesadaran masyarakat Kelurahan Sukarame terhadap bahaya korupsi.

E. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini terbagi dua, yaitu:

- a) Data primer, yaitu data yang diperoleh melalui observasi langsung di lapangan oleh peneliti dan juga melalui wawancara langsung.
- b) Data sekunder, merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung melalui dokumentasi, buku-buku yang berkaitan dengan korupsi.

F. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini ada beberapa alat yang digunakan untuk mengumpulkan data. Antara alat pengumpul data tersebut berfungsi saling melengkapi akan data yang dibutuhkan untuk mengumpulkan data dan informasi pada penelitian ini, digunakan beberapa teknik berikut :

1. Teknik Studi Dokumenter

Menurut Hadari Nawari (1993) teknik/studi dokumenter adalah cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, terutama berupa arsip-arsip

2. Wawancara

Moh. Nazir (1996/:234) memaparkan yang dimaksud dengan wawancara proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya dengan si penjawab atau responden dengan digunakan alat yang dinamakan Interview Guide (panduan wawancara).

G. Teknik Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, tahap selanjutnya adalah dilakukannya pengolahan data. Adapun langkah-langkah pengolahan data melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Seleksi data

Tahap pengolahan data yang dilakukan dengan cara meneliti ulang data-data yang diperoleh mencakup kelengkapan jawaban, kejelasan tulisan, serta kesesuaian antara jawaban yang satu dengan yang lain serta untuk mengetahui apakah ada kekurangan data/tidak sesuai dengan pokok permasalahan.

2. Klarifikasi data

Yaitu menempatkan atau mengelompokkan data sesuai dengan pokok gagasan atau pokok permasalahan yang telah disusun.

3. Penyusunan data

Yaitu kegiatan menyusun data secara sistematis menurut tata urutan yang telah ditetapkan sehingga menjadi mudah dianalisis.

H. Teknik Analisis Data

Tahapan analisis data meliputi:

1. Pembuatan transkripsi hasil wawancara.
2. Mengkategorikan informasi yang terkumpul yang ada di transkripsi hasil wawancara.
3. Mencari persamaan dan perbedaan serta melakukan perbandingan informasi setiap kasus.
4. Reduksi Data

5. Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan dengan membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus, membuat partisi dan menulis memo.
6. Penyajian Data (*Display Data*)
7. Penyajian data sebagai kumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan yang dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan. Lebih jauh lagi menganalisis atau mengambil tindakan berdasarkan atau pemahaman yang didapat dari penyajian-penyajian tersebut.
8. Penarikan Kesimpulan
9. Kegiatan analisis yang terakhir adalah penarikan kesimpulan. Meninjau ulang catatan-catatan yang diperoleh di lapangan sebagai upaya yang luas untuk mendapatkan temuan-temuan dalam seperangkat data yang ada.
10. Melakukan penafsiran data yang menggambarkan satu kesatuan sebagai jawaban dari permasalahan yang telah dirumuskan.

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Sukarame I

Pada zaman penjajahan Belanda Kelurahan Sukarame I merupakan bagian dari Kelurahan Sukabumi yang sebagian besar arealnya/tanahnya termasuk Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan asing (Belanda). Ketika Jepang ke Indonesia, perkebunan karet tersebut dibumihanguskan oleh Jepang untuk dipergunakan tanaman Padi Rakyat yang kemudian oleh penggarap areal tanah tersebut dijadikan tempat pemukiman dan perladangan hingga sekarang.

Sebutan Sukarame sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda karena secara rutin setiap hari minggu para buruh atau Pekerja Perkebunan menerima gaji/upah dan selalu ramai dengan berbagai jenis hiburan rakyat atau tontonan, maka diberilah nama atau julukan Sukarame.

Pada zaman pemerintahan Belanda sekitar tahun 1933 Sukarame merupakan penduduk Sukabumi dengan Kepala Kampung saudara Muhammad Nawu, yang kemudian terjadilah penggantian jabatan Kepala Kampung melalui pemilihan dan pengangkatan oleh saudara Kromotikno.

Dan semenjak Kepala Kampung Kromotikno memimpin pemerintahan maka Sukarame menjadi pusat pemerintahan dengan nama kampung Sukarame dan Sukabumi menjadi penduduknya.

Berdasarkan Surat Keputusan Residen Lampung Nomor: 35/0/tanggal 19 Maret 1959 Kampung Sukabumi dan Sukarame berdiri sendiri dengan kepala pemerintahan masing-masing di kepalai oleh Hasanuddin sebagai kepala kampung Sukabumi dan M. Djamsari sebagai kepala kampung Sukarame. Menjelang meletusnya G.30.S. PKI kampung Sukarame dipecah menjadi dua kampung susukan, yaitu kampung susukan Way Dadi dan kampung susukan Way Hui yang masing-masing susukan dikepalai oleh kepala susukan.

Kemudian setelah meletusnya G. 30.S.PKI tahun 1965 kepala susukan Way dadi terlibat G. 30.S.PKI, dan oleh pemerintah daerah tingkat II Lampung Selatan dibubarkan dan digabungkan kembali dengan kampung Sukarame, sedangkan kampung Way Hui tetap berdiri sendiri.

Setelah itu bedasarkan PP Nomor 3 Tahun 1982 tentang perubahan batas Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung Kelurahan Sukarame menjadi Kelurahan Sukarame I yang merupakan pusat pemerintahan Kecamatan Sukarame pada waktu itu (Sumber: Monografi Kelurahan Sukarame I Kecamatan Sukarame Bandar Lampung Tahun 2009).

B. Batas Wilayah Kelurahan Sukarame I

Batas-batas Kelurahan Sukarame I kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Way Dadi
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Sukabumi
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Jagabaya dan Way Halim

4. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sebalau Kecamatan Tanjung Bintang

(Sumber: Monografi Kelurahan Sukarame I Kecamatan Sukarame Bandar Lampung Tahun 2009)

C. Luas dan Orbitasi Kelurahan Sukarame I

Kelurahan Sukarame I bertanggung jawab kepada camat Sukarame. Adapun luas wilayahnya adalah 493 Ha dengan ketinggian dari permukaan laut 15 M. Dan orbitasi kelurahan Sukarame I Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung adalah:

- a. Jarak dari Pusat Pemerintahan Kecamatan : 2 km
- b. Jarak dari Ibukota Kabupaten/Kodya Daerah Tingkat II : 5 km
- c. Jarak dari Ibukota propinsi DATI I : 10 km
- d. Jarak dari Ibukota Negara : 260 km

(Sumber: Monografi Kelurahan Sukarame I Kecamatan Sukarame Bandar Lampung Tahun 2009).

D. Iklim dan Keadaan Tanah

Curah hujan pada Kelurahan Sukarame I Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung terbanyak yaitu seperti biasa pada bulan Desember sampai dengan April dengan klasifikasi sekitar 3000 mm/thn. Adapun status /permukaan tanah Kelurahan Sukarame I kecamatan Sukarame Bandar Lampung adalah dataran rendah, jenis tanah subur, yaitu kehitam-hitaman. Tingkat kesuburan tanah termasuk tanah yang baik dan subur serta masih nampak hamparan sawah begitu

juga dengan perladangan (Sumber: Monografi Kelurahan Sukarame I Kecamatan Sukarame Bandar Lampung Tahun 2009).

E. Keadaan Demografi

Data keadaan demografi penduduk Kelurahan Sukarame berdasarkan jenis kelamin, umur dan tingkat pendidikan adalah sebagai berikut:

1. Distribusi Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Untuk mengetahui jumlah penduduk Kelurahan Sukarame I berdasarkan jenis kelamin, dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 1. Distribusi penduduk Kelurahan Sukarame I Menurut Jenis Kelamin.

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1.	laki-laki	8.662	47,62
2.	Perempuan	9.527	52,38
Jumlah		18.189	100

Sumber: Monografi Kelurahan Sukarame I Kecamatan Sukarame Bandar Lampung

Berdasarkan table diatas, diketahui bahwa penduduk yang ada di Kelurahan Sukarame I berjumlah 18.189 jiwa, dimana dari jumlah tersebut yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 9.527 jiwa atau 52,38 % dan penduduk yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 8.662 jiwa atau 47,62%. Dengan demikian maka dari keseluruhan jumlah penduduk yang ada di Kelurahan Sukarame I, tampak bahwa penduduk berjenis kelamin perempuan memiliki jumlah yang lebih banyak apabila dibandingkan dengan penduduk berjenis kelamin laki-laki.

2. Distribusi Penduduk Berdasarkan Umur

Untuk mendapatkan gambaran mengenai jumlah penduduk berdasarkan umur di Kelurahan Sukarame I dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 2: Distribusi Penduduk Kelurahan Sukarame I Menurut Kelompok Umur.

No	Kelompok Umur	Jumlah	Persentase
1	0-4 tahun	3.102	17,05
2	5-6 tahun	1.552	8,53
3	7-13 tahun	1.580	8,69
4	14-16 tahun	1.342	7,38
5	17-24 tahun	3.201	17,6
6	25-54 tahun	4.073	22,4
7	55 tahun keatas	3.339	18,36
Jumlah		18.189	100

Sumber: Monografi Kelurahan Sukarame I Kecamatan Sukarame Bandar Lampung Tahun 2009

Berdasarkan table diatas, diketahui bahwa penduduk yang ada di Kelurahan Sukarame I Kecamatan Sukarame Bandar Lampung dengan golongan usia mayoritas berada pada kelompok umur 25-54 tahun yaitu 4.073 jiwa atau 22.4% dan golongan usia minoritas adalah penduduk yang berusia 14-16 tahun yaitu 1.342 jiwa atau 7,38%.

3. Distribusi Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Untuk mendapatkan gambaran mengenai distribusi penduduk berdasarkan tingkat pendidikan, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3: Distribusi Penduduk Kelurahan Sukarame I Menurut Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	Sarjana	1.193	6,56
2	Sarjana Muda	407	2,24
3	SLTA	3.446	18,94
4	SLTP	2.533	13,93
5	SD	7.077	38,91

6	Taman Kanak-kanak	844	4,64
7	Belum Sekolah	2.689	14,78
Jumlah		18.189	100

Sumber: Monografi Kelurahan Sukarame I Kecamatan Sukarame Bandar Lampung Tahun 2009

Bedasarkan data pada tabel di atas diketahui bahwa penduduk di Kelurahan Sukarame I telah memahami tentang arti penting pendidikan. Hal ini terlihat dari tidak adanya penduduk yang berstatus buta huruf, dimana jumlah penduduk yang meneyam pendidikan sampai pada tingkat SLTA/SMU, yaitu mencapai 3.446 jiwa atau 18,94% sedangkan penduduk yang telah meneyam pendidikan sampai pada tingkat Sarjana/ Perguruan Tinggi mencapai 1.193 jiwa atau mencapai 6,56%.

4. Distribusi Penduduk Berdasarkan Agama

Untuk mendapatkan gambaran mengenai jumlah penduduk berdasarkan agama di Kelurahan Sukarame I dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4: Distribusi Penduduk Kelurahan Sukarame I Menurut Agama

No	Agama	Jumlah	Persentase
1		17.733	97,49
2	n Protestan	161	0,89
3	n Katholik	168	0,92
4		56	0,31
5		71	0,39
Jumlah		18.189	100

Sumber: Monografi Kelurahan Sukarame I Kecamatan Sukarame Bandar Lampung Tahun 2009

Berdasarkan data pada tabel di atas diketahui bahwa penduduk di Kelurahan Sukarame I berdasarkan agama mayoritas beragama islam yaitu mencapai 17.733 jiwa atau sebanyak 97,49%, dan penduduk yang beragama minoritas adalah budha yaitu sebanyak 56 jiwa atau sebanyak 0.31%.

F. Kronologis Jabatan Kepala Kelurahan Sukarame I

Kronologis jabatan kepala kelurahan sukarame I adalah sebagai berikut:

1. Kepala Desa Sukarame I yang ke I adalah Bapak Muhammad Nawi tahun 1930.
2. Kepala Desa Sukarame I yang ke II adalah Bapak Kromotikno dari tahun 1930-1940.
3. Kepala Desa Sukarame I yang ke III adalah Bapak Sakir dari tahun 1940-1948.
4. Kepala Desa Sukarame I yang ke IV adalah bapak M. Djamsari dari tahun 1948-1980.
5. Kepala Desa Sukarame I yang ke V adalah Bapak M. Sanusi dari tahun 1980-1984.
6. Kepala Desa Sukarame I yang ke VI adalah Ny. Entjun Sunariah dari tanggal 29 Agustus 1985- tanggal 9 Februari 1989.
7. Kepala Kelurahan Sukarame I yang ke VII adalah Bapak Salehuddin dari tanggal 10 Februari 1989- tanggal 19 April 1994.
8. Kepala kelurahan Sukarame I yang ke VIII adalah Bapak Drs. Yahya dari tanggal 19 April 1994- tanggal 12 November 1998.
9. Kepala Kelurahan Sukarame I yang ke IX adalah Bapak M. Husein dari tanggal 10 November 1998- tanggal 15 Januari 2002.
10. Kepala Kelurahan Sukarame I yang ke X adalah Bapak Darsani Jasri, S.Pd dari tanggal 15 Januari 2002- tanggal 9 Maret 2005.
11. Kepala Kelurahan Sukarame I yang ke XI adalah Bapak Paksi sabirin, S. Ip dari tanggal 9 Maret 2005- tanggal 14 Februari 2007.

12. Kepala Kelurahan Sukarame I yang ke XII adalah Bapak Drs. Suherman dari tanggal 14 Februari 2007- tanggal 15 Juli 2007.
13. Kepala Kelurahan Sukarame I yang ke XIII adalah Bapak Drs. Junaidi dari tanggal 15 Juli 2007- tanggal 18 Maret 2008.

V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Informan

Dalam penelitian ini jumlah informan sebanyak 5 orang masyarakat yang berada di lingkungan Sukarame , yang mempunyai tanggapan yang berbeda-beda.

Setelah diadakannya penelitian terhadap 5 orang tersebut, dalam hal ini tanggapan dan kesadaran masyarakat terhadap bahaya korupsi, berikut ini akan digambarkan hasil penelitian yang menunjukkan profil informan kemudian pembahasan ,mengenai tanggapan dan kesadaran masyarakat terhadap bahaya korupsi bagi masyarakat lingkungan Sukarame.

B. Profil Informan

1. Profil Informan I

Bu Dessy adalah seorang ibu muda yang bekerja di salah satu perusahaan swasta di kota Bandar Lampung. Ia memiliki satu anak laki-laki yang uasiannya baru 1 tahun 6 bulan.

Bu Dessy menceritakan tentang maraknya pemberitaan kasus-kasus korupsi akhir-akhir ini. Katanya:

“ Iya akhir-akhir ini setiap saya menonton televisi pemberitaan yang sedang marak-maraknya membahas tentang kasus-kasus korupsi yang terjadi di negeri

ini. Saya sangat tidak menyangka sekali ternyata begitu banyaknya para oknum pejabat tinggi Negara yang melakukan tindak pidana korupsi “.

Menurut bu Dessy korupsi sangat merugikan orang banyak, terutama masyarakat yang tidak mampu. Yang mana hak-hak masyarakat kecil telah di ambil oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Sumber informasi yang diketahui mengenai korupsi menurutnya dari media elektronik atau media cetak, ia menuturkan :

“ Korupsi merupakan suatu perbuatan yang tercela, yang mana pelaku korupsi bisa sama dikatakan sebagai pencuri. Karena mereka telah mengambil uang yang bukan hak mereka. Tujuan dari para koruptor ialah hanya ingin memperkaya dirinya sendiri ”.

Menyinggung tentang tanggapan dan kesadaran masyarakat terhadap kasus-kasus korupsi, bu Dessy mengatakan bahwa kebanyakan masyarakat apatis terhadap kasus-kasus korupsi. Ia pun menuturkan :

“ Iya saya perhatikan masyarakat kita terlalu cuek dengan kasus-kasus korupsi, mereka lebih banyak diam dan tidak peduli. padahal kalo mereka sadar korupsi itu sangat merugikan kita semua. Karena apa yang seharusnya menjadi hak kita, tapi ternyata kita tidak mendapatkannya. Contohnya saja, uang pajak yang selalu kita bayar ke kantor pajak, seharusnya dengan demikian kita mendapatkan fasilitas yang baik seperti jalan raya yang bagus tiadak ada lubangnya, tapi ternyata disetiap sudut kota jalan rusak tidak sesuai dengan apa yang telah kita lakukan. Dan yang ada uang pajak tersebut malah dikorupsi dengan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, dengan demikian kita tidak mendapatkan hak kita. Mungkin dengan adanya pemerintah melakukan sosialisasi tentang korupsi terhadap masyarakat, itu dapat memberikan efek yang tanggap dan kesadaran bagi mereka agar aktif apabila terjadi kasus-kasus korupsi. Dengan demikian dapat membangun sebuah perubahan bagi masyarakat itu sendiri maupun birokrat pemerintah itu sendiri “.

Membahas tentang keikutsertaan masyarakat dalam mengikuti perkembangan kasus korupsi, ia tidak begitu mengikuti dengan pasti perkembangan kasus-kasus korupsi pada saat ini. Katanya :

“ mengikuti perkembangan kasus demi kasus yang terjadi pada saat ini secara mendetail itu tidak, karena saya melihat pemberitaan atau kasus-kasus korupsi ketika saya memiliki waktu luang saja, contohnya ketika saya sedang istirahat kerja atau setelah pulangny dari kerja baru menonton televisi untuk mengetahui berita-berita yang terjadi. Walaupun demikian sedikit banyak saya mengetahuinya apa saja kasus-kasus korupsi yang terjadi pada saat ini “.

2. Profil Informan II

Pak Syaiful Efendi merupakan salah satu warga yang tinggal di Kelurahan Sukarame. Usianya 45 Tahun, Pekerjaan pak Syaiful ialah sebagai pegawai PTPN VII.

Pak Syaiful menuturkan bahwa sekarang ini kasus korupsi sedang hangat-hangatnya dibicarakan semua orang, ia mencertiakan :

“ benar sekali,, akhir-akhir ini saya dan teman-teman di kantor sering membicarakan tentang kasus-kasus korupsi yang terjadi sekarang. Lagi pula itu menjadi tema yang sangat menarik untuk dibicarakan ketika kami memiliki waktu-waktu luang saat sedang bekerja”.

Pak Syaiful bercerita bahwa begitu teganya para pejabat-pejabat yang mana telah diberi amanah oleh rakyat untuk membangun negeri ini, tetapi apa yang diharapkan tidak sesuai dengan kenyataan. Malah kebanyakan dari mereka memfoya-foayakan uang yang seharusnya bukan miliknya untuk kesenangan pribadi, katanya :

“ perbuatan korupsi merupakan perbuatan yang benar-benar tidak terpuji dan melawan hukum, ia pun meyamakan para koruptor itu sama dengan pencuri. Yang mana perbuatan mereka sama-sama mengambil sesuatu yang memang bukan milik mereka “.

Meunrut Pak Syaiful sumber informasi pengetahuan mengenai korupsi, kebanyakan ia dapatkan dari media cetak. ia berkata :

“ karena saya memiliki hobi membaca, jadi untuk menambah pengetahuan saya lebih suka membaca langsung berita apa yang ada di media cetak. ketimbang menonton berita yang disiarkan melalui media elektronik “.

Adapun ditanya tentang tanggapan akan bahaya korupsi, Pak Syaiful menanggapi pertanyaan itu dengan tegas, tuturnya :

“ korupsi menurut saya sangat berbahaya, bagaimana tidak bahaya karena akibat dari korupsi tersebut dapat memberikan penderitaan yang berkepanjangan bagi rakyat di negeri ini. Oleh karena itu, sebaik mungkin kita harus mengantisipasi dan mencegah agar tidak terjadinya praktek-praktek korupsi dengan cara mengawasi kinerja aparat pemerintahan saat ini “.

Bentuk kesadaran yang telah dilakukan oleh Pak Syaiful ialah dengan cara lebih mendekatkan diri kepada Tuhan dan lebih banyak bersyukur dengan apa yang telah ia miliki saat ini. Katanya :

“ saya lebih menyadari dan meyakinkan dan menanamkan di dalam diri saya bahwa korupsi merupakan perbuatan yang tidak baik. dengan demikian insya allah saya akan terjauh dari sifat buruk tersebut “.

Sebagai masyarakat yang baik dalam Pak Syaiful selalu mengikuti perkembangan kasus-kasus korupsi yang terjadi pada saat ini, karena keikutsertaan masyarakat sangat penting dalam mengawasi perkembangan kasus-kasus korupsi. Menurutnya :

“ adanya masyarakat yang aktif dan selalu mengikuti perkembangan kasus korupsi, saya rasa penanganan kasus korupsi akan berjalan dengan baik dan bersih tanpa ada nepotisme di balik semua itu. Sebaliknya, apabila masyarakat pasif maka para pelaku koruptor tidak akan pernah tersentuh oleh hukum sedikitpun. Oleh karena itu, kita sebagai masyarakat harus lebih aktif dan berani menggadukan kepihak-pihak yang berwajib apabila disekitar kita ada yang melakukan tindakan korupsi”.

3. Profil Informan III

Bu Suryati sekarang berusia 45 tahun. Ia seorang Guru SD di Kelurahan Sukarame, sudah hampir 25 tahun ia mengabdikan sebagai Guru di SD tersebut.

Bu Suryati menceritakan tentang apa saja faktor-faktor mendorong seseorang melakukan tindakan korupsi. Kata Bu Suryati :

“ tindak pidana korupsi itu muncul karena : (1) Dorongan Kebutuhan : seseorang terpaksa korupsi karena gaji yang jauh dari mencukupi dibanding kebutuhannya yang lebih besar . (2) Dorongan Keserakahan : orang yang korupsi karena serakah tentu saja tidak didorong oleh kebutuhan yang sudah mencukupi, sehingga dengan korupsi dapat membeli barang-barang mewah karena kepuasan itu tidak ada batasnya. (3) Lingkungan : dengan adanya lingkungan yang sama melakukan tersebut itu dapat berpengaruh. (4) Peluang : akibat lemahnya pengawasan member peluang bagi mereka yang akan melakukan tindak pidana korupsi”.

Kemudian ketika disinggung tentang bagaimana tanggapan dan bentuk kesadaran ia miliki terhadap korupsi, dengan pelan ia menjawab semua pertanyaan dengan jelas. Bu Suryati menuturkan :

“ kali ini saya memiliki anggapan bahwa korupsi begitu sangat berbahaya dan harus kita jauhi karena korupsi telah memberikan kesengsaraan bagi semua masyarakat di negeri ini dan kesengsaraan ini tidak akan berakhir, apabila korupsi di negeri kita ini tidak diberantas. Oleh karena itu, kita harus memberantas aksi-aksi korupsi yang terjadi di negeri ini. Insya allah dengan tidak adanya oknum-oknum yang melakukan korupsi negeri kita akan makmur dan sejahtera. Dengan demikian dalam menjalani hidup saya memiliki kesadaran diri yang tinggi, menyadari mana yang menjadi hak saya dan mana yang bukan menjadi hak saya dan selalu bersikap mawas diri. Saya yakin dengan saya memiliki sikap tersebut saya tidak akan melakukan perbuatan tidak terpuji itu”.

Keikutsertaan dalam mengikuti perkembangan berita-bertita tentang kasus korupsi,

Bu Suryati berkata bahwa ia selalu mengikuti perkembangan kasus korupsi dengan melihat pemberitaan di media elektronik maupun media cetak, katanya :

“ alasan saya selalu mengikuti pemberitaan karena saya sangat tertarik dengan maraknya kasus-kasus korupsi yang telah banyak terungkap saat ini. Sedikit banyak saya merasa puas dengan hasil kerja pemerintah akhir-akhir ini karena

meraka telah berani memberantas kasus-kasus korupsi yang terjadi sekarang ini. Saya rasa kita sebagai masyarakat harus mengawasi dan member dukungan kepada aparat pemerintah yang berani menegakkan kebenaran”.

4. Profil Informan IV

Ferry Purnomo berusia 21 tahun ia adalah seorang mahasiswa. Ia kuliah di Master Computer . Sejak lahir hingga saat ini Ferry tinggal di Kelurahan Sukarame. Ayah Ferry bernama Triono Arifin dan Ibunya bernama Siti Aminah. Ferry memiliki 1 Kakak Perempuan dan 1 Adik Perempuan, ia merupakan anak laki-laki satu-satunya di keluarganya. Dalam kehidupan sehari-hari kedua orang tua Ferry selalu mengajarkana agar ia selalu bersikap jujur kepada siapa saja dan dimana saja. Di singgung tentang korupsi ia hanya menjawab yang ia ketahui bahwa Negara kita merupakan Negara nomor lima terkorup di ASEAN. Katanya :

“ yang saya tau sih ,, Indonesia merupakan peringkat kelima setelah Singapura, Brunei Darusallam, Malaysia, Thailand. Korupsi di Indonesia memang sudah berlangsung sejak lama. Bukan tidak berhasil diberantas, sebaliknya semakin merajalela saja ”.

Ketika di Tanya pengetahuannya mengenai korupsi dan sumber informasi yang didapat, Ferry menjawab:

“ korupsi menurut definisi saya, korupsi adalah sesuatu yang buruk, rusak dan busuk. Karena tindakan seseorang yang berani menguasai tanpa hak dan melawan hukum. yang mana akibat dari perbuatan tersebut, terutama Negara atau rakyat sangat dirugikan. Kecuali karena kekayaannya digerogeti, program-program untuk mensejahterakan masyarakat menjadi sangat terganggu dan lumpuh. Sumber informasi mengenai korupsi, kebanyakan saya ketahui dari media elektronik seperti Tv dan radio, karena saya sangat hobi nonton tv juga jadi saya gak pernah ketinggalan untuk nonton perkembangan berita yang terjadi saat ini ”.

Ditanya kembali apakah sejauh ini sudah cukup baik kah usaha pemerintah dalam memberantas kasus korupsi pada saat ini, Ferry menuturkan:

“ menurut saya sejauh ini usaha pemerintah sudah cukup baik dalam memberantas korupsi, karena seperti kita ketahui lama kelamaan semua kasus-

demis kasus semua terkuak dengan pemerintah yang sudah berani bertindak tegas terhadap kasu-kasu yang terjadi “.

Adapun tanggapan dan bentuk kesadaran yang ia tunjukkan, fery menjawabnya dengan penuh semangat, katanya :

“ sebaiknya kita sebagai masyarakat merapatkan barisan untuk berani maju bersama-sama memberantas korupsi, dengan kita seperti itu saya Negara kita akan terbebas dari korupsi dan bisa menjadi Negara makmur dan sejahtera. Maka dari itu, peran pemerintah dituntut harus lebih aktif dalam memberikan sosialisasi terhadap bahaya korupsi kepada masyarakat. dengan demikian itu dapat menanamkan kesadaran dalam diri masing-masing masyarakat. contohnya saja saya dari kedua orang tua selalu ditanamkan untuk selalu jujur kepada siapa saja dan dimana saja, kemudian dengan seperti itu dimana saja saya bisa menempatkan diri saya dan terjauh dari hal-hal negative”.

Keikutsertaannya dalam memberantas korupsi, ia merupakan . Contohnya saja saya pernah mengikuti aksi unjuk rasa dalam menuntut pemerintah agar mengusut tuntas kasus-kasu korupsi yang terjadi. Ia menceritakan :

“iya saya pernah menjadi salah satu peserta unjuk rasa bersama mahasiswa kampus saya dalam menuntut pemerintah agar mengusut tuntas kasus-kasu korupsi. Saya sangat simpatik melakukan hal-hal yang bersifat positif seperti ini dan tidak hanya itu saya juga selalu mengikuti perkembangan kasu demi kasu yang terjadi pada saat ini “.

5. Profil Informan V

Pak Heriyanto berusia 35 tahun. Ia merupakan seorang wiraswasta. Pak Heriyanto menceritakan tentang pengetahuannya terhadap korupsi, menurut ia upaya pemberantasan korupsi bukan masalah baru bagi kita bangsa Indonesia. Yang saya ketahui perjalanan panjang bangsa memberantas korupsi tidak membuahkan hasil sebagaimana yang diharapkan. Bahkan, sebaliknya korupsi semakin merajalela dan kini sudah sampai pada tahapan sangat merugikan keuangan Negara dan menghambat pembangunan nasional. Pak Heriyanto berkata :

“ kenyataanya pada saat ini menunjukkan bahwa upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan hingga kini, belum juga dapat dilaksanakan optimal. Oleh karena, tidak pernah diberantas secara sungguh-sungguh hingga tuntas. Yang ada kejahatan tersebut terus berkembang bahkan merajalela hingga merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara rakyat Indonesia”.

Kemudian disinggung mengenai tanggapan dan bentuk kesadaran terhadap bahaya korupsi, Pak Heriyanto menjawab dengan singkat:

“ Tanggapan saya terhadap bahaya korupsi yang pasti efeknya dapat merugikan bangsa dan Negara, sehingga dapat menimbulkan kelumpuhan pada system perekonomian dan pembangunan Negara. kemudian bentuk kesadaran yang saya miliki ialah mencanangkan budaya tidak korupsi bagi generasi penerus yang akan menjadi pemimpin bangsa ”.

Dalam keikutsertaannya dalam mengikuti perkembangan kasus korupsi pada saat ini, Pak Heriyanto menuturkan bahwa ia kurang mengikuti perkembangan kasus-kasus korupsi yang terjadi pada saat ini. Tuturnya :

“ karena saya seorang wiraswata sangat jarang sekali saya mengikuti pemberitaan-pemberitaan tentang korupsi. Ketika memiliki waktu luang saja saya baru menonton tv untuk mengetahui berita-berita pada saat ini, mungkin bisa dikatakan saya kurang dalam mengiktui perkembangan kasus demi kasus korupsi “.

C. Deskripsi Hasil Penelitian Dalam Bentuk Tabel

Tabel 5. Identitas Informan

Informan	Informan 1	Informan 2	Informan 3	Informan 4	Informan 5
Nama	Dessy	Syaiful E.	Suryati	Ferry	Heriyanto
Usia	27 th	45 th	45 th	21 th	35 th
Alamat	Sukarame	Sukarame	Sukarame	Sukarame	Sukarame
Agama	Islam	Islam	Islam	Islam	Islam
Pekerjaan	Karyawan Swasta	Karyawan PTPN VII	Guru	Mahasiswa	Wiraswasta

Tabel 6. Tanggapan Terhadap Bahaya Korupsi

Informan	Tanggapan
Informan 1	Menurut Ibu Dessy masyarakat kita terlalu cuek dengan kasus-kasus korupsi, mereka lebih banyak diam dan tidak peduli. padahal kalo mereka sadar korupsi itu sangat merugikan kita semua. Karena apa yang seharusnya menjadi hak kita, tapi ternyata kita tidak mendapatkannya. Sebab itulah korupsi sangat berbahaya bagi kita.
Informan 2	Menurut Pak Syaiful korupsi sangatlah berbahaya, bagaimana tidak bahaya karena akibat dari korupsi tersebut dapat memberikan penderitaan yang berkepanjangan bagi rakyat di negeri ini. Oleh karena itu, sebaik mungkin kita harus mengantisipasi dan mencegah agar tidak terjadinya praktek-

	<p>praktek korupsi dengan cara mengawasi kinerja aparat pemerintahan saat ini.</p>
Informan 3	<p>Menurut Ibu Suryati korupsi begitu sangat berbahaya dan harus kita jauhi karena korupsi telah memberikan kesengsaraan bagi semua masyarakat di negeri ini dan kesengsaraan ini tidak akan berakhir, apabila korupsi di negeri kita ini tidak diberantas. Oleh karena itu, kita harus memberantas aksi-aksi korupsi yang terjadi di negeri ini. Insha allah dengan tidak adanya oknum-oknum yang melakukan korupsi negeri kita akan makmur dan sejahtera.</p>
Informan 4	<p>Ferry menuturkan sebaiknya kita sebagai masyarakat merapatkan barisan untuk berani maju bersama-sama melawan bahaya korupsi dan memberantas aksi-aksi korupsi, dengan kita seperti itu saya Negara kita akan terbebas dari korupsi dan bisa menjadi Negara makmur dan sejahtera.</p>
Informan 5	<p>Tanggapan Pak Heriyanto terhadap bahaya korupsi yang pasti efeknya dapat merugikan bangsa dan Negara, sehingga dapat menimbulkan kelumpuhan pada system perekonomian dan pembangunan Negara.</p>

Tabel 7. Bentuk Kesadaran Terhadap Bahaya Korupsi

Informan	Bentuk Kesadaran
Informan 1	Ibu Dessy dalam menjalankan hidupnya ia mengetahui dan selalu menyadari mana yang menjadi haknya dan mana yang bukan, dengan demikian ia tidak akan berani mengambil hak-hak yang bukan menjadi haknya.
Informan 2	lebih menyadari dan meyakinkan dan menanamkan di dalam diri saya bahwa korupsi merupakan perbuatan yang tidak baik. dengan demikian insya allah saya akan terjauh dari sifat buruk tersebut.
Informan 3	Dengan memiliki kesadaran diri yang tinggi, menyadari mana yang menjadi hak saya dan mana yang bukan menjadi hak saya dan selalu bersikap mawas diri. Saya yakin dengan saya memiliki sikap tersebut saya tidak akan melakukan perbuatan tidak terpuji itu”.
Informan 4	Lebih bersikap jujur terhadap hidup dan menjauhi perbuatan-perbuatan yang akibatnya dapat merugikan orang lain.
Informan 5	bentuk kesadaran yang ia miliki ialah mencanangkan budaya tidak korupsi bagi generasi penerus yang akan menjadi pemimpin bangsa.

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dapat diketahui kebanyakan dari mereka mengatakan setuju bahwa tindakan korupsi sangat berbahaya dan menyadari bahwa perbuatan korupsi itu dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan, merugikan banyak orang dan hilangnya rasa kepercayaan masyarakat kepada aparat pemerintah.

Dengan demikian, dapat meningkatkan kepekaan masyarakat terhadap bahaya korupsi. Yang mana kepekaan ini harus ditanamkan sejak dini, melalui pembangunan kesadaran di tingkat anak-anak sampai remaja. Yang nantinya diharapkan bisa memacu masyarakat Kota Bandar Lampung untuk menolak perbuatan korupsi.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan saran atau masukan yang sifatnya membangun agar dalam pemberantasan kasus-kasus Korupsi dapat melibatkan para penyelenggara negara maupun seluruh masyarakat Indonesia. Kemudian, perlu diadakannya sosialisasi yang dilakukan pemerintah dalam memberi pemahaman atau pengertian akan bahaya korupsi kepada masyarakat.

Dan dalam pencegahan korupsi perlu dimasukkan dalam kurikulum pendidikan dan pengajaran di sekolah dan perguruan tinggi serta lembaga pendidikan lainnya dengan penyajian substansi yang disesuaikan dengan tingkatan kurikulum peserta didik.

Kontrol masyarakat yang lebih intensif lagi terhadap upaya Pencegahan Korupsi perlu penyelenggaraan program siaran tetap melalui radio dan televisi, disamping pemuatan rubrik atau artikel tetap melalui media cetak.

DAFTAR PUSTAKA

- Albrow, Martin. 1970. *Bureaucracy*. London: MacMillan and Company, Ltd.
- Amanda L. Morgan. 1998. *Corruption: Causes, Consequences, and Policy Implementation (A Theoretical Review)*. World Bank Working Paper.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. 1999. *Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional*. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Latihan Pengawasan BPKP.
- Berger, Peter L. 1982. *Piramida Kurban Manusia: Etika Politik dan Perubahan Sosial*. Jakarta: LP3ES.
- Cambridge International Dictionary of English*, 1995: Cambridge ; New York : Cambridge University Press.
- Ever, Hans-Dieter Evers dan Tilman Schiel. 1980. *Kelompok-kelompok Strategis: Studi Perbandingan tentang Negara, Birokrasi, dan Pembentukan Kelas di Dunia Ketiga*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Faqih, Mansour. 2001. *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi*. Yogyakarta: Insist dan Pustaka Pelajar.
- Giddens, Anthony. 1986. *Kapitalisme dan Teori Sosial Modern: Suatu Analisis Karya Tulis Marx, Durkheim, dan Weber*. Jakarta: UI Press.
- Indonesian Corruption Watch. 2004. *Menyingkap Tabir Mafia Peradilan*. Makalah. Jakarta: Tim Pemantau Peradilan ICW.
- Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia. 2002. *Survai Nasional Mengenai Korupsi di Indonesia*. Laporan Akhir Tahun 2002. Jakarta.
- Lubis, Mochtar dan James Scott. 1993. *Korupsi Politik*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Luwarso, Lukas. 2000. *Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Liputan Pers*. Jakarta: Bappenas.

- Masduki, dkk. 2002. *Jurnalisme Antikorupsi: Panduan untuk Jurnalis*. Yogyakarta: AJI, IDEA, dan Partnership.
- Nasution, Adnan Buyung, Ahmad Syafii Maarif, dkk. 1999. *Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di Indonesia*. Jakarta: Aditya Media.
- Syfarudin, dkk. 1998. *Menembus Arus: Perspektif Reformasi dari Lampung (Buku II)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sapu Lidi. Desember 2001. *Majalah Gerakan Antikorupsi*. Bandar Lampung.
- Tim Peneliti Departemen Riset dan Kajian Strategis ICW. 2000. *Korupsi di Pelayanan Publik. Hasil Survei*. Jakarta.
- Wuryanto, Doddy, dkk. 2002. *Panduan Rakyat Memberantas Korupsi*. Bandar Lampung: Komite Antikorupsi.
- Vishanath, Tara dan Daniel Kaufman. 1999. *Toward Transparency in Finance and Governance*. The World Bank Draft.
- _____, Misteri – Majalah investigasi suprnatural, Edisi 20 April – 4 Oktober 2000.

**TANGGAPAN DAN KESADARAN MASYARAKAT
TERHADAP BAHAYA KORUPSI**
(Studi Pada Masyarakat Kelurahan Sukarame Bandar Lampung)

(Skripsi)

Oleh :

Rini Oktriana Putri
0646011034



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2010**